

PERSPEKTIF REALISME *OFENSIF* MEARSHEIMER DAN PANCASILA BAGI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERGOLAKAN DAN KETIDAKPASTIAN GLOBAL: SEBUAH STUDI LITERATUR

I Putu Yoga Bumi Pradana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

email: yoga.pradana@staf.undana.ac.id

Abstrak

Dalam menghadapi kompleksitas pergolakan dan ketidakpastian dalam skenario global saat ini, negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada tuntutan untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif dan efektif. Artikel ilmiah ini membahas perpaduan antara perspektif Realisme Ofensif Mearsheimer dan nilai-nilai ideologis Pancasila dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Realisme Ofensif Mearsheimer menawarkan pandangan tentang bagaimana negara-negara cenderung mengamankan kepentingan nasional dengan meraih kekuasaan sebanyak mungkin dalam lingkungan anarki sistemik. Di sisi lain, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia membimbing pendekatan kebijakan yang menekankan perdamaian, kerjasama, dan demokrasi. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menyajikan pandangan realisme ofensif dan nilai-nilai Pancasila, serta sejauh mana kerangka kerja ini dapat membantu Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Dengan merujuk pada teori realisme ofensif Mearsheimer, penulis mengidentifikasi elemen-elemen yang relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam hal menjaga keamanan dan mengamankan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Namun, artikel ini juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Artikel ini memberikan kontribusi dalam membuka pemahaman tentang pentingnya penggunaan teori hubungan internasional sebagai kaca mata berpikir dalam membentuk kebijakan nasional di tengah pergolakan global yang terus berubah.

Kata Kunci: *Realisme Ofensif, Pancasila, Kebijakan Publik, Politik Luar Negeri*

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang penuh pergolakan dan ketidakpastian, negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keamanan nasional dan kestabilan regional. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, tidak luput dari dampak dinamika global yang terus berubah. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu

merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif dan adaptif (Firmansyah et al., 2018; Sari & Delanova, 2021).

Salah satu teori yang memiliki potensi untuk memberikan pandangan mendalam terhadap strategi kebijakan luar negeri adalah Realisme Ofensif yang dikembangkan oleh ilmuwan politik terkemuka, John Mearsheimer. Dalam konteks ini, Mearsheimer berpendapat bahwa negara-negara cenderung mengamankan diri mereka sendiri dengan cara meraih kekuasaan sebanyak mungkin dalam lingkungan yang penuh anarki dan ketidakpastian (Mearsheimer, 2021). Teori ini mendasarkan dirinya pada pandangan realis dalam hubungan internasional, dengan penekanan pada upaya negara-negara untuk mencapai kekuasaan maksimal dalam lingkungan anarki sistemik. Dalam realisme ofensif, negara-negara cenderung mengadopsi sikap ofensif untuk memaksimalkan keamanan dan kepentingan nasionalnya (Toft, 2005).

Di sisi lain, Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, telah memainkan peran sentral dalam membimbing pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan sejak proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, demokrasi, dan perdamaian, telah menjadi landasan moral dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Kekuatan ideologis Pancasila memberikan ciri khas pada pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia, yang menekankan diplomasi damai, kerjasama regional, dan penyelesaian konflik (Kusmawati et al., 2022; Lukito et al., 2022).

Pada konteks inilah pandangan realisme ofensif Mearsheimer dan Pancasila merupakan dua Kompas utama yang relevan dalam membantu formulasi kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan mendalami perspektif realisme ofensif dengan nilai-nilai Pancasila, artikel ini bertujuan untuk menyajikan cara pandang kedua teori tersebut untuk dapat menjadi panduan bagi Indonesia dalam menghadapi pergolakan dan ketidakpastian global dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana situasi global kontemporer secara politik, militer dan ekonomi ?
2. Bagaimana teori realisme ofensif Mearsheimer dalam memandang interaksi hubungan internasional?
3. Bagaimana peran pancasila dan perspektif realisme Mersheimer bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi situasi global yang bergejolak?

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap implikasi dan aplikasi realisme ofensif Mearsheimer dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, diharapkan artikel ini akan memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam

menjawab tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas nasional dan menghadapi pergolakan global.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini mengaplikasikan metode tinjauan literatur untuk memahami perspektif realisme ofensif dan nilai-nilai Pancasila bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Atas dasar itu, studi ini akan mempelajari berbagai artikel ilmiah, buku, berita, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan untuk menjawab ketida pertanyaan penelitian. Pemilihan metode tinjauan literatur, tersistematis karena metode ini memungkinkan adanya analisis, penggabungan dan sintesis berbagai gagasan konseptual dan temuan-temuan penting yang terkait dengan pertanyaan penelitian (Thelwall, 2008; Thomas & Gupta, 2022).

Penelitian ini berkontribusi pada dua hal. Pertama, studi ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai gambaran umum situasi global kontemporer secara politik, militer dan ekonomi. Kedua, artikel ini berkontribusi dalam menyajikan cara pandang teori realisme ofensif Mearsheimer dalam memandang interaksi hubungan internasional. Ketiga, studi ini menyajikan suatu cara pandang baru mengenai peran pancasila dan perspektif realisme Mersheimer dalam memberikan panduan bagi kebijakan Pemerintah Indonesia di masa depan pada konteks hubungan internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur tersistematis pada 30 kepustakaan baik itu berupa artikel-artikel jurnal ilmiah, buku, berita dan laporan-laporan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur tersistematis karena metode ini dipandang tepat untuk memahami perkembangan *body of knowledge* dari suatu topik penelitian, sebagaimana telah digunakan oleh para ahli terdahulu dalam mengkaji beragam topik penelitian seperti topik inovasi sektor publik, manajemen dan pariwisata (Akmal et al., 2018; Pradana et al., 2022; Ruhanen et al., 2015). Atas dasar itulah, maka metode tinjauan literatur tersistematis dipandang tepat untuk digunakan mempelajari isu realisme ofensif Mearsheimer, Pancasila, kebijakan public dan hubungan internasional.

Lebih jauh lagi, sumber data artikel dalam studi ini diperoleh dari database *google scholar* atau *google* untuk artikel-artikel, buku-buku atau laporan-laporan pemerintah. Untuk mencari artikel-artikel, penelitian ini menggunakan kata kunci “realisme ofensif, Pancasila, geopolitik” *karena* kata kunci ini memungkinkan studi ini untuk menemukan artikel spesifik yang terkait dengan tema-tema dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil analisis atas sejumlah artikel-artikel kepustakaan tersebut kemudian disajikan sebagai hasil

dari studi literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Moher et al., 2009; Page et al., 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pergolakan Situasi Global Kontemporer

Bagian ini bertujuan untuk menjawab situasi global kontemporer saat ini penuh dengan pergolakan politik, ekonomi, dan militer yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini membawa dampak yang signifikan pada tatanan dunia dan menciptakan ketidakpastian yang meluas. Studi literatur menunjukkan bahwa pergolakan tersebut mencakup tiga aspek utama: politik, ekonomi, dan militer.

Pertama, dalam konteks politik, pergolakan situasi global kontemporer ditandai oleh pergeseran kekuatan dan persaingan antara negara-negara besar. Menurut dokumen strategi keamanan nasional Amerika Serikat, China dan Rusia dianggap sebagai rival strategis yang mencoba menggeser keseimbangan kekuatan global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin meningkat, menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak pada negara-negara lain. Menurut Pew Research Center, 45% responden di negara-negara Eropa dan Asia-Pasifik menganggap Tiongkok sebagai ancaman, sedangkan 36% melihat Amerika Serikat sebagai ancaman (Pew Research Center, 2021).

Lebih jauh lagi, pergolakan politik di Eropa juga terjadi melalui munculnya kelompok-kelompok nasionalis yang menentang integrasi Uni Eropa. Brexit atau *British Exit* menjadi contoh nyata pergolakan politik di era kontemporer ini. Dalam referendum pada tahun 2016, 51,9% pemilih Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Keputusan ini mencerminkan ketidakpuasan dan perasaan ketidakamanan politik yang meluas di antara negara-negara anggota. Selain itu, ancaman terorisme global juga menjadi faktor penting dalam pergolakan situasi politik. Menurut Global Terrorism Index, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah serangan teroris sejak tahun 2000, dengan lebih dari 33.000 serangan yang dilaporkan pada tahun 2019. Serangan teroris seperti yang terjadi di Paris, Brussel, dan New York mengubah cara negara-negara melihat keamanan dan hubungan internasional (Institute for Economics & Peace, 2020).

Kedua, dalam konteks ekonomi, globalisasi telah menciptakan ketergantungan yang lebih besar antara negara-negara di seluruh dunia. Ketika ekonomi global terganggu, negara-negara di seluruh dunia merasakan dampaknya. Salah satu contoh yang signifikan adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurut World Bank, perang dagang antara kedua negara ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 2018,

ketika eskalasi tarif perdagangan terjadi, pertumbuhan ekonomi dunia turun menjadi 3,0% dari sebelumnya 3,8% pada tahun 2017. Selain perang dagang, situasi global kontemporer juga diwarnai oleh meningkatnya kesenjangan ekonomi. Menurut laporan Oxfam, pada tahun 2020, delapan orang terkaya di dunia memiliki kekayaan bersih yang setara dengan 3,6 miliar orang terkaya. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan antara negara-negara dan dalam negara-negara itu sendiri menjadi pemicu ketegangan sosial dan politik (OXFAM, 2020).

Mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih berlangsung saat ini, efeknya juga dirasakan oleh Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus pada tahun 2021 menyoroti dampak perang dagang terhadap Indonesia. Dalam studinya, Sitorus (2021) menjelaskan bahwa konflik dagang yang dimulai dengan keputusan luar negeri Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memberlakukan tarif terhadap produk dari Tiongkok, mengakibatkan Tiongkok juga memberlakukan tindakan perlindungan perdagangan yang berdampak pada ekonomi global. Tindakan pembalasan ini mempengaruhi negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan kedua negara tersebut, termasuk Indonesia, terutama dalam sektor ekspor, impor, dan investasi saham. Terkait hal ini, Sitorus (2021) menjelaskan bahwa dampak perang dagang mulai terasa lebih kuat di Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, terjadi pelemahan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia ke level 6.194,50. Selain itu, harga ekspor minyak kelapa sawit turun menjadi 556 dolar Amerika per ton, dan harga ekspor batu bara menjadi 88,3 dolar per ton.

Studi lainnya terkait dampak perang dagang AS dan Tiongkok juga dilakukan oleh Natalia (2020) khususnya bagi saham di Indonesia. Studi tersebut menemukan bahwa investasi saham mengalami penurunan yang mana disebabkan pasar saham Indonesia dipengaruhi oleh pasar saham Amerika Serikat dan Tiongkok. Keputusan investor domestik dan internasional untuk investasi jangka pendek saat perang dagang terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara langsung mempengaruhi pasar saham di Indonesia.

Ketiga, dalam konteks militer, terjadinya polarisasi kekuatan aliansi militer dunia seperti NATO¹, AUKUS², QUAD³ yang berhadapan-hadapan dengan China, Russia, CSTO⁴, Iran, dan Korea Utara telah meningkatkan rivalitas militer dan pengembangan teknologi canggih seperti senjata nuklir, sistem pertahanan rudal, dan kekuatan militer di luar angkasa. Polarisasi dan rivalitas secara militer ini telah menyebabkan ketidakstabilitas regional wilayah tertentu, dan konflik bersenjata. Salah satu contoh signifikan adalah perang saudara di Suriah yang telah berlangsung sejak tahun 2011. Menurut Amnesty International, lebih dari 380.000 orang tewas dalam konflik tersebut dan jutaan orang menjadi pengungsi. Konflik ini melibatkan kekuatan-kekuatan regional dan global, serta kelompok-kelompok pemberontak yang saling bersaing. Selain itu, ketegangan militer di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan juga menjadi sumber pergolakan situasi global. Ancaman nuklir Korea Utara dan perselisihan klaim wilayah antara beberapa negara di wilayah Asia Timur menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan ketegangan militer di daerah tersebut (Amnesty International, 2019; Ene, 2021).

Merujuk berbagai situasi di atas, pergolakan situasi global kontemporer dalam bidang politik, ekonomi, dan militer membentuk tatanan dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Persaingan kekuatan antara negara-negara besar, perang dagang, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik militer adalah tantangan yang harus dihadapi oleh komunitas internasional. Untuk itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan perspektif bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan di tengah-tengah situasi global yang

¹ NATO adalah singkatan dari *North Atlantic Treaty Organization* atau dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa dan 1 Negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan Bersama yang didirikan pada tahun 1949. Organisasi ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Tujuan dibentuknya NATO pada saat itu untuk menandingi tentara Soviet yang ditempatkan di Eropa Timur dan tengah. Anggota asli NATO terdiri dari 12 negara

² AUKUS atau sebuah akronim bahasa Inggris untuk tiga negara anggota: Australia, United Kingdom, United States. AUKUS adalah sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS) yang didirikan pada 15 September 2021. Di bawah pakta tersebut, Amerika Serikat dan Britania Raya akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir, selain mengerahkan militer Barat di kawasan Pasifik.

³ QUAD (NATO versi Asia: AS, Jepang, Australia dan India). Quad sendiri merupakan aliansi yang sebelumnya digagas oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada 2007. Beberapa pihak menilai bahwa aliansi ini didirikan untuk membendung pengaruh China di kawasan Asia Pasifik

⁴ CSTO atau Organisasi Traktat Keamanan Kolektif (Collective Security Treaty Organization) merupakan sebuah aliansi militer antar-pemerintahan yang ditandatangani pada 15 Mei 1992. Pada 1992, enam negara pasca-Soviet yang termasuk dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka—Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, dan Uzbekistan—menandatangani Traktat Keamanan Kolektif (juga disebut sebagai "Pakta Tashkent" atau "Traktat Tashkent").

bergejolak demi kebaikan kepentingan nasional dan harmonisasi kehidupan negara-negara dunia.

2. Perspektif Realisme Ofensif Mearsheimer dalam hubungan internasional kontemporer

Bagian ini akan menjelaskan mengenai teori realisme ofensif yang dikembangkan oleh John Mearsheimer dalam memandang interaksi antar negara di panggung internasional. Dalam kajian hubungan internasional, perspektif realisme ofensif Mearsheimer merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami dinamika konflik dan keamanan global. Menurut perspektif ini, negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan memiliki dorongan untuk mencapai kekuasaan dan dominasi relatif terhadap negara-negara lain. Dalam subbagian ini akan mengeksplorasi bagaimana perspektif realisme ofensif Mearsheimer melihat situasi hubungan internasional kontemporer yang bergejolak secara militer, ekonomi, dan politik (Mearsheimer, 2021; Rösch, 2022).

Pertama, dalam konteks militer, perspektif realisme ofensif Mearsheimer melihat situasi internasional kontemporer sebagai panggung pertarungan antara negara-negara besar yang saling berkompetisi untuk mencapai dominasi dan keunggulan militer. Mearsheimer berpendapat bahwa negara-negara akan selalu berusaha memperkuat kekuatan militer mereka untuk melindungi kepentingan nasional dan mengamankan posisi strategis mereka (Toft, 2005).

Salah satu contoh pergolakan militer yang terjadi saat ini adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan mereka melibatkan peningkatan belanja militer, pengembangan teknologi militer, dan rivalitas di wilayah Asia-Pasifik. Tiongkok, dengan ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut, telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam modernisasi militer mereka. Amerika Serikat, sebagai kekuatan dominan saat ini, juga merespons dengan meningkatkan kehadiran militer mereka di kawasan tersebut. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, pengeluaran militer global pada tahun 2020 mencapai \$1,98 triliun, dengan Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi dua negara dengan pengeluaran militer tertinggi di dunia. Amerika Serikat menghabiskan \$778 miliar, sementara Tiongkok menghabiskan \$252 miliar untuk keperluan militer. Persaingan militer ini juga tercermin dalam pengembangan teknologi canggih seperti senjata nuklir, sistem pertahanan rudal, dan kekuatan militer di ruang angkasa (“Stockholm International Peace Research Institute Special Issue,” 2021).

Kedua, dalam konteks ekonomi, perspektif realisme ofensif Mearsheimer melihat persaingan ekonomi global sebagai bagian integral dari dinamika hubungan internasional. Negara-negara bertindak secara ofensif untuk melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi nasional mereka, termasuk melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan pengaruh ekonomi global (Mearsheimer, 2021).

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah contoh yang relevan dalam konteks ini. Persaingan ekonomi antara kedua negara ini mencakup tarif perdagangan yang saling diberlakukan, pembatasan investasi, dan perselisihan terkait kekayaan intelektual. Pada tahun 2018, AS memberlakukan tarif tambahan atas impor barang dari Tiongkok senilai \$250 miliar, dan Tiongkok merespons dengan tarif serupa terhadap impor dari AS. Sehubungan dengan hal tersebut, *World Trade Organization* (WTO) melaporkan bahwa perdagangan global mengalami tekanan pada tahun-tahun terakhir ini, sebagian besar disebabkan oleh ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Dalam laporan terbarunya, WTO memperkirakan bahwa pertumbuhan perdagangan dunia pada tahun 2021 akan mencapai 8%. Namun, ketidakpastian akibat perang dagang dan gangguan ekonomi terkait pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi proyeksi tersebut (World Trade Organization, 2021).

Ketiga, dalam konteks politik, perspektif realisme ofensif Mearsheimer melihat situasi hubungan internasional kontemporer sebagai panggung pertarungan politik antara negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional dan mengamankan kekuasaan politik. Persaingan politik antara negara-negara besar sering kali melibatkan upaya untuk mempengaruhi struktur politik global dan memperluas pengaruh mereka (Mearsheimer, 2018, 2021).

Contoh pergolakan politik yang terjadi saat ini adalah persaingan antara Rusia dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Ketegangan politik ini melibatkan perang informasi, serangan siber, dan intervensi politik di negara-negara lain. Contoh yang paling mencolok adalah tuduhan adanya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 dan peningkatan ketegangan di sejumlah negara Eropa Timur (Nawaz et al., 2022; Raska, 2020). Terkait dengan hal ini, data dari lembaga intelijen AS, seperti Central Intelligence Agency (CIA) dan Federal Bureau of Investigation (FBI), telah memberikan informasi dan bukti terkait campur tangan Rusia dalam pemilihan AS. Selain itu, organisasi internasional seperti European Union External Action Service (EEAS) juga mencatat upaya campur tangan politik Rusia di beberapa negara anggotanya (Albertson & Guiler, 2020; Kim, 2020).

Pada akhirnya dalam perspektif realisme ofensif Mearsheimer, situasi hubungan internasional kontemporer yang bergejolak secara militer, ekonomi, dan politik dipahami sebagai produk dari persaingan antara negara-negara besar untuk mencapai dominasi dan keunggulan relatif. Perspektif ini menekankan dorongan alami negara-negara untuk melindungi dan memperkuat kepentingan nasional mereka, baik itu melalui pengembangan kekuatan militer, persaingan ekonomi, atau pengaruh politik. Pemahaman ini menggambarkan situasi global yang penuh dengan ketegangan dan konflik, di mana negara-negara berusaha mencapai tujuan mereka melalui berbagai cara, termasuk rivalitas militer, perang dagang, dan persaingan politik.

3. Peran Pancasila dan perspektif realisme Mersheimer bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi situasi global yang bergejolak

Bagian ini akan menjelaskan mengenai peran Pancasila dan perspektif realisme Mersheimer bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Namun sebelumnya, perlu dipahami bahwa kebijakan luar negeri suatu negara adalah refleksi dari nilai, kepentingan, dan tujuan nasionalnya. Dalam menghadapi situasi global yang bergejolak secara ekonomi, politik, dan militer, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki tantangan yang kompleks (Rosmawandi, 2022; Yani & Montratama, 2018). Dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari dua konsep yang relevan: Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan perspektif realisme Mearsheimer yang menyoroti persaingan kekuatan dalam hubungan internasional.

4. Peran Pancasila dalam memberikan arah kebijakan luar negeri Indonesia

Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang mengandung lima prinsip yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan dalam menentukan kebijakan luar negeri yang berkeadilan, berlandaskan hukum internasional, dan mempromosikan perdamaian serta kesejahteraan (Latif, 2011; Melani et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi global yang bergejolak, Indonesia dapat mengambil pendekatan yang berdasarkan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam perdagangan

internasional serta penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain, baik melalui organisasi regional seperti ASEAN maupun melalui forum-forum internasional seperti G20, untuk mempromosikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini penting karena menurut data World Trade Organization (WTO), Indonesia merupakan anggota aktif dalam sistem perdagangan multilateral dan telah aktif berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Pada tahun 2020, Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia berdasarkan paritas daya beli dan menjadi salah satu anggota kelompok negara G20 yang merupakan forum utama bagi negara-negara maju dan berkembang untuk berkoordinasi dalam masalah ekonomi dan keuangan global (World Trade Organization, 2021).

Selanjutnya, dalam konteks politik global yang bergejolak, Indonesia dapat mengambil pendekatan yang berdasarkan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini mencakup dukungan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, penyelesaian konflik damai, serta peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum internasional untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas.

Sehubungan dengan hal ini, Indonesia telah dan dipandang harus meningkatkan peran aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian konflik di tingkat regional maupun internasional. Sebagai contoh, Indonesia telah memberikan kontribusi personel untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti misi di Lebanon (UNIFIL), Thailand dan Kamboja. Indonesia juga telah menjadi mediator dalam beberapa konflik regional, seperti dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan kelompok separatis di Mindanao (Alunaza SD & Anggara, 2018; Antuli et al., 2019; Sundari et al., 2021).

Terakhir, dalam konteks militer global yang terpolarisasi, Pancasila memberikan landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempromosikan perdamaian, menghindari konflik bersenjata, dan menjaga kemerdekaan dan netralitas negara. Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pancasila menekankan pentingnya keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Indonesia telah menjunjung tinggi prinsip non-blok dan tidak terikat pada aliansi militer tertentu. Meskipun memiliki kekuatan militer yang signifikan, Indonesia menempatkan penekanan pada pertahanan yang defensif dan mempromosikan kerjasama militer dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi anggota aktif dalam organisasi keamanan regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan

memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan menghadapi ancaman keamanan di Kawasan (Anwar, 2012; Eslava et al., 2017)

5. Perspektif Realisme Mearsheimer dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Perspektif realisme ofensif Mearsheimer menyoroti persaingan kekuatan dalam hubungan internasional. Dalam menghadapi situasi global yang berkejolak secara ekonomi, politik, dan militer, Indonesia dapat menerapkan prinsip realisme Mearsheimer sebagai panduan dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ekonomi global yang berkejolak, Indonesia harus mempertimbangkan persaingan ekonomi dengan negara-negara lain. Indonesia perlu memperkuat ekonomi nasionalnya, melalui reformasi struktural, peningkatan daya saing, dan diversifikasi ekonomi. Menurut data Bank Dunia, Indonesia telah mengimplementasikan berbagai reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing. Pada tahun 2019, Indonesia naik dua peringkat dalam laporan *Doing Business* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, menunjukkan kemajuan dalam upaya reformasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program pengembangan infrastruktur yang ambisius, seperti pembangunan jaringan transportasi dan energi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (The World Bank, 2019).

Dalam konteks politik global yang berkejolak, Indonesia harus memperhatikan rivalitas kekuasaan dan persaingan politik antara negara-negara besar. Indonesia perlu menjaga kemerdekaan dan netralitasnya, dengan tidak terjebak dalam konflik politik dan aliansi yang dapat merugikan kepentingan nasional. Indonesia telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan dan netralitas dalam hubungan internasional. Indonesia secara konsisten mendukung prinsip non-blok dan tidak terikat pada aliansi militer tertentu (Chrystofer, 2017; Hara, 2019). Sebagai contoh, Indonesia telah menjadi anggota pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) dan aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi potensi adanya usaha dari negara-negara besar yang sedang berkonflik untuk mengintervensi proses pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan melakukan investasi finansial pada salah satu atau seluruh calon presiden. Tindakan ini penting karena jika tidak dihadapi dengan tepat, presiden yang terpilih kemungkinan akan terikat oleh utang politik yang akan mempengaruhi kebijakan negara. Hal ini berpotensi menyebabkan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan pendekatan bebas aktif. Selain itu, situasi

ini juga berpotensi menarik Indonesia ke dalam konflik negara-negara besar dunia, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap politik, ekonomi, sosial, dan agama masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan proaktif untuk menghadapi ancaman ini demi menjaga kestabilan dan kedaulatan Indonesia.

Dalam konteks militer global yang bergejolak, Indonesia harus memperkuat pertahanan nasionalnya dan menjaga stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pertahanan dan kerjasama militer dengan negara-negara tetangga, serta berperan aktif dalam dialog keamanan regional. Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan dan modernisasi militer dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), belanja pertahanan Indonesia meningkat sebesar 49% antara tahun 2010 dan 2019. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kerjasama pertahanan regional, seperti melalui Forum Kepolisian Negara-Negara Asia Tenggara (ASEANAPOL) dan latihan militer bersama dengan negara-negara tetangga (SIPRI, 2021).

D. Simpulan

Dalam menghadapi situasi global yang bergejolak secara ekonomi, politik, dan militer, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari peran Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan perspektif realisme Mearsheimer yang menyoroti persaingan kekuatan dalam hubungan internasional. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip realisme Mearsheimer dalam kebijakan luar negeri, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan bijaksana dan efektif. Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, Indonesia perlu memperhatikan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, serta berperan aktif dalam upaya mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan global.

Daftar Pustaka

- Akmal, A., Podgorodnichenko, N., Greatbanks, R., & Everett, A. M. (2018). Bibliometric analysis of production planning and control (1990–2016). *Production Planning and Control*, 29(4), 333–351. <https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1429030>
- Albertson, B., & Guiler, K. (2020). Conspiracy theories, election rigging, and support for democratic norms. *Research and Politics*, 7(3). <https://doi.org/10.1177/2053168020959859>
- Alunaza SD, H., & Anggara, D. (2018). Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF).

- Indonesian Perspective*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20178>
- Amnesty International. (2019). Everything you need to know about human rights in Syria. In *Amnesty International*.
- Antuli, R. R., Heryadi, D., & Rezasyah, T. (2019). Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14131>
- Anwar, D. F. (2012). The Cold War and its impact on Indonesia: Domestic politics and foreign policy. In *Southeast Asia and the Cold War*. <https://doi.org/10.4324/9780203116616-16>
- Chrystofer, C. (2017). Penguatan Hubungan Politik Internasional Indonesia dalam Mewujudkan Kedaulatan Poros Maritim yang Ideal. *Gema Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3633>
- Ene, D. V. (2021). SYRIA – “THE WAR WITH MULTIPLE PROXIES”. VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND HUMAN RIGHTS. *STRATEGIES XXI - Security and Defense Faculty*, 17(1). <https://doi.org/10.53477/2668-2001-21-20>
- Eslava, L., Fakhri, M., & Nesiah, V. (2017). The Spirit of Bandung. In *Bandung, Global History, and International Law*. <https://doi.org/10.1017/9781316414880.003>
- Firmansyah, A. R., Gunawan, D., & Pedrason, R. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menyikapi Kompetisi India dan China di Samudera Hindia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 4(2). <https://doi.org/10.33172/jdp.v4i2.243>
- Hara, A. E. (2019). Pengantar Analisis Politik Luar Negeri. In *Penerbit Nuansa Cendekia*.
- Institute for Economics & Peace. (2020). Global Terrorism Index 2020, Measuring the Impact of Terrorism. In *Institute for Economics & Peace*.
- Kim, Y. M. (2020). Uncover: Strategies and Tactics of Russian Interference in US Elections Russian Groups Interfered in Elections with Sophisticated Digital Campaign Strategies. *Project DATA*.
- Kusmawati, W. E., Putri, R. E., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a National Development Paradigm in Community, Nation, and State. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(3).
- Latif, Y. (2011). negara paripurna 3. In *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas dan aktualisasi pancasila*.
- Lukito, W. S., Permana, A., & Prasetyo, A. (2022). Pancasila and the Recontextualization of Indonesia's State Identity: International Relations Approach. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2). <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.122>
- Mearsheimer, J. J. (2018). Conventional Deterrence: An Interview with John J. Mearsheimer. *Strategic Studies Quarterly*, 13(4).
- Mearsheimer, J. J. (2021). The Inevitable Rivalry: America, China, and the Tragedy of Great-Power Politics. *Foreign Affairs*, 100(6).
- Melani, J. A., Asbari, M., & Wahyudi, J. (2023). Mengapa Pacasila Perlu Ada? Telaah

- Singkat Pemikiran Yudi Latif. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1).
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., ... Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Natalia, I. (2020). PENGARUH PASAR SAHAM AMERIKA SERIKAT, TIONGGOK DAN INDONESIA SELAMA PERANG DAGANG 2018-2020. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.49>
- Nawaz, R., Bilal, A., & Rehman, M. (2022). United States-China Space Offensive: A Dangerous Competition. *Astropolitics*, 20(1). <https://doi.org/10.1080/14777622.2022.2078195>
- OXFAM. (2020). Time to Care: unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis. In *OXFAM Briefing Paper* (Issue 1).
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *The BMJ* (Vol. 372). <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pew Research Center. (2021). *Demographics of Internet and Home Broadband Usage in the United States* | Pew Research Center. Research Topics.
- Pradana, I. P. Y. B., Susanto, E., & Kumorotomo, W. (2022). Bibliometric Analysis of Public Sector Innovation. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3), 297–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.69862>
- Raska, M. (2020). Strategic competition for emerging military technologies: Comparative paths and patterns. *Prism: A Journal of the Center for Complex Operations*, 8(3).
- Rösch, F. (2022). Realism, the War in the Ukraine, and the Limits of Diplomacy. *Analyse Und Kritik*, 44(2). <https://doi.org/10.1515/auk-2022-2030>
- Rosmawandi, H. (2022). Kedudukan Geopolitik Indonesia dalam Dinamika Rivalitas China dan Amerika Serikat | Change Think Journal. *Change Think Journal*, 1(2).
- Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B. D., & McLennan, C. lee J. (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: a 25-year bibliometric analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(4), 517–535. <https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978790>
- Sari, S., & Delanova, M. (2021). STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN DAYA TAWAR DI KAWASAN INDO-PASIFIK. *Jurnal Dinamika Global*, 6(01). <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.415>
- SIPRI. (2021). *SIPRI Military Expenditure Database* | SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute.
- Sitorus, D. S. (2021). Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok: Bagaimana

- Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia Tahun 2017 - 2020? *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 13(1). <https://doi.org/10.23887/jjpe.v13i1.34192>
- Stockholm International Peace Research Institute Special Issue. (2021). *National Security Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.36878/nsj202112>
- Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 14(1). <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>
- The World Bank. (2019). Doing Business 2019 Report. *World Bank*.
- Thelwall, M. (2008). Bibliometrics to webometrics. *Journal of Information Science*, 34(4), 605–621. <https://doi.org/10.1177/0165551507087238>
- Thomas, A., & Gupta, V. (2022). Tacit knowledge in organizations: bibliometrics and a framework-based systematic review of antecedents, outcomes, theories, methods and future directions. In *Journal of Knowledge Management* (Vol. 26, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/JKM-01-2021-0026>
- Toft, P. (2005). John J. Mearsheimer: An offensive realist between geopolitics and power. *Journal of International Relations and Development*, 8(4). <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800065>
- World Trade Organization. (2021). World Trade Report 2021: Economic Resilience and Trade. *World Trade Report*.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA: SUATU TINJAUAN GEOPOLITIK. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>